

**ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PENDIDIKAN BOARDING SCHOOL SMK NEGERI 3
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Ivana Andi Sabani*

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang.
Email: sabani.ivanandi@gmail.com.

ABSTRACT

Poverty is a classic problem of mankind in every part of the world and becomes a complex issue because it is not just about low income. The low level of education, skills, and the lack of introduction to technology are the human resource constraints that are closely related to the causes of poverty. Purbalingga regency is one of the areas with a high percentage of poor people who are always ranked in the poorest areas in Central Java Province. The purpose of this research is to analyze the policy of poverty reduction by Purbalingga Government through establishment of Boarding School of SMK Negeri 3 Purbalingga.

This study uses mixed methods between qualitative and quantitative with a qualitative approach remains the main approach. Data collection techniques were carried out, among others, by collecting documents and in-depth interviews with actors involved in the policy, and using a research questionnaire to the research subjects of alumni / boarding school graduate SMK Negeri 3 Purbalingga. Analysis of research data is done by combining primary data obtained and findings in both qualitative and quantitative data.

Based on the research that has been done, it is known that the policy has been implemented optimally, consistently, and there is a continuous suitability of vision among policy actors in 3 different Heads of District (Bupati), and achievements that can penetrate TOP 35 in Public Service Innovation Competition (SiNovik) 2016. Quantitative data shows that there is an increase of living standards of alumni SMK Negeri 3 Purbalingga coming from poor families, as the object of poverty problem in Purbalingga Regency. This shows that policies that have the principle of breaking the poverty chain have succeeded in reducing the number of poor people, the sustainability of the program is likely to reduce poverty significantly.

Keywords: Poverty Reduction, Education Implementation Model, Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan sebuah negara karena terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mengandung makna mendalam mengenai persoalan kemiskinan. Tidak salah rasanya jika kemiskinan dianggap menjadi persoalan klasik yang kompleks sejak umat manusia ada dan tampaknya selalu menjadi sangat aktual dari masa ke masa di setiap belahan dunia. Benar bahwa kemiskinan merupakan masalah pendapatan yang rendah, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya aspek yang menjadi sumber kemiskinan. Dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif seperti kesehatan dan pendidikan, PBB mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi dimana individu-individu tidak memiliki pilihan dan kesempatan di dalam mengembangkan kapabilitas hidupnya. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan sebuah kondisi *pronounced deprivation in well-being* atau penurunan kualitas hidup secara terus menerus¹. Rendahnya pendidikan, keahlian dan ketrampilan, serta minimnya pengenalan terhadap teknologi adalah hambatan sumber daya manusia yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan selain hambatan struktural, institusional, dan keadaan sosial budaya. Pengabaian masalah-masalah manusia sebagai subyek dalam pengentasan kemiskinan diyakini sebagai penyebab kegagalan dalam mengatasi masalah kemiskinan, mengingat masyarakat golongan miskin bagaimanapun merupakan manusia dengan beragam masalah yang memerlukan solusi melalui suatu kebijakan. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari Pendapatan Domestik Bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Kualitas Sumber Daya Manusia dalam suatu negara memiliki *multiplier effect* terhadap pembangunan negara tersebut, khususnya pembangunan ekonomi.

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), karena salah satu indeks yang penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pengetahuan. Dengan pendidikan yang memadai, maka pembangunan nasional diharapkan mudah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Deklarasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang melanjutkan dari apa yang sudah dibangun pada *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki lima pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun

¹ Kemal A. Stamboel. (2012). *Panggilan Keberpihakan: Strategi Mengakhiri Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global yang mana dalam tujuan nomor 1 (satu) adalah Tanpa Kemiskinan sementara tujuan Pendidikan Berkualitas berada dalam urutan ke-4 (empat). Hal tersebut menunjukkan urgensi permasalahan kemiskinan tidak jauh berkaitan dengan pengembangan pendidikan dalam penyelenggaraan negara, mengingat keterkaitan antara kemiskinan dan pendidikan sudah banyak menjadi pembahasan sentral di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Kemiskinan di Indonesia, khususnya data empiris mengenai kemiskinan di Pulau Jawa jika dilihat per provinsi yang ada di Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia, pada tahun tahun 2009 terdapat 3 provinsi yang jumlah penduduk miskinnya di atas 1 juta jiwa, yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6,022 juta jiwa, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5,725 juta jiwa, dan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,983 juta jiwa. Provinsi Jawa Tengah secara berurutan dari tahun 2007 sampai dengan 2009 persentase penduduk miskinnya mencapai 20,43 persen, 19,23 persen, dan 17,72 persen, walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun, namun Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 menduduki peringkat pertama dalam hal persentase penduduk miskin jika dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya di Pulau Jawa. Selain itu, selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009, ternyata persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah selalu paling tinggi jika dibandingkan dengan lima provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa². Dilansir dari data terbaru Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Tengah Presentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah tahun 2012-2014 sudah cenderung semakin menurun, yakni berkisar pada angka 14 %, namun apabila dilihat per Kabupaten/Kota terdapat lebih banyak daerah dengan presentase penduduk miskin yang lebih dari 14 %.

Kabupaten Purbalingga merupakan daerah di Jawa Tengah yang berada pada peringkat 4 wilayah termiskin dengan persentase penduduk miskin sebesar 19.75 %. Angka tersebut apabila dibandingkan dengan persentase 2 tahun sebelumnya merupakan penurunan yang tidak terlalu signifikan namun membawa arah positif karena sudah dapat turun dibawah angka 20 %, namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga menjadi

² Ari Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K. “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah*”. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1 No.1, Juli 2011.

wilayah termiskin di daerah eks-Karesidenan Banyumas. Selain angka kemiskinan tersebut, ternyata terdapat aspek-aspek yang menggambarkan permasalahan kemiskinan yang cukup serius di Kabupaten Purbalingga, diantaranya angka pengangguran di Purbalingga juga cukup tinggi, yakni mencapai 5,72 persen dari 27 ribu angkatan kerja dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga berada pada level yang sangat memprihatinkan, karena pada tahun 2015 terjun bebas menjadi peringkat 27 se-Jawa Tengah. Ukuran Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri dipengaruhi beberapa variabel, antara lain kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di bidang kesehatan, rendahnya Angka Harapan Hidup menjadi faktor penurunan peringkat IPM Purbalingga. Sedangkan dalam penyelenggaraan pendidikan, persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) masih jauh dari harapan³.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga *Boarding School* merupakan instansi pendidikan kejuruan gratis, khusus bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga. Gagasan mulia ini dimotori oleh mantan Bupati Purbalingga Drs. Heru Sudjatmoko, M.Si., sekitar akhir tahun 2010. Setelah melalui proses yang panjang, pada akhirnya tahun pelajaran 2013/2014 proses penerimaan siswa resmi telah dibuka dan pelaksanaan proses pendidikan siap dilaksanakan pada tahun tersebut berdasar Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 26 tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014. Sumber dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga. Perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengembangkan pendidikan kejuruan yang menjangkau dunia industri adalah aspek vital dalam menciptakan kerjasama yang menghubungkan pendidikan dengan dunia kerja, agar SMK menjadi wadah utama bagi tenaga kerja terampil yang mendorong kemajuan ekonomi nasional dan berpengaruh pada angka kemiskinan.

Rumusan masalah penelitian adalah:

Bagaimanakah tingkat keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan mendirikan sekolah gratis *Boarding School* SMK Negeri 3?

³ Uraian selengkapnya dalam <http://satelitnews.co/berita--purbalingga-termiskin-di-karesidenan-banyumas.html>, Redaksi Satelit Post, 14 Juli 2016 di akses tanggal 1 September 2016

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan dalam studi kebijakan publik menurut Hughes (Dalam Subarsono: 2005), adalah analisis kebijakan, yang lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan kebijakan (*policy formation*) dan kebijakan publik politik, yang lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan. Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dalam program publik. Pengetahuan tersebut, betapa pun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan publik terhadap siapa para analisis berkewajiban melayaninya⁴. Subarsono (2013: 88) menyatakan bahwa implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain⁵. Menurut Edwards, ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, meliputi: a) *Communication transmission, clarify and consistency*; b) *Resources: staff information, authority facilities*; c) *Disposition: incentives, staffing*; dan d) *Bureaucratic Structure: standard operating procedures, fragmentation*.

Kemiskinan dan Pendidikan

Hubungan kemiskinan dan pendidikan dapat dipahami bahwa kemiskinan menjadi hambatan bagi pencapaian pendidikan pada tingkat makro maupun mikro. Pada tingkat makro, negara miskin secara umum memiliki tingkat partisipasi pendidikan (*enrolment rate*) yang rendah. Sementara di tingkat mikro, anak-anak dalam rumah tangga miskin cenderung

⁴ Ismail Nawawi. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktik*. Surabaya: PMN. Hlm 39

⁵ AG. Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 89-93

sedikit mendapat pendidikan (Stamboel, 2012: 143). Akan tetapi sebenarnya hubungan kemiskinan dan pendidikan bukan sekedar hubungan sebab-akibat karena kompleksitas permasalahan yang dipicu oleh dua aspek tersebut sangat beragam. Kemiskinan seseorang tidak selalu dibenarkan karena alasan pendidikan yang rendah, dan sebaliknya, tingginya pendidikan seseorang juga tidak menjamin kesejahteraan hidup seseorang yang bersangkutan. Pendirian lembaga pendidikan sangat erat berkaitan dengan permasalahan kemiskinan melalui paradoks ketenagakerjaan yang dijelaskan memandang bahwa kebutuhan akan tenaga kerja sangat mendesak, namun pengangguran terus meningkat. Hal tersebut berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dalam perkembangan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga berdasar kesempatan keterserapan tenaga kerja yang diperoleh siswa setelah mendapat akses yang mudah untuk mendapat kesempatan belajar dan meningkatkan keterampilan.

DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya yang bertujuan untuk menghindarkan seorang atau sekelompok orang dari keadaan atau kondisi miskin sebagai bentuk usaha peningkatan taraf hidup, yang dapat diukur melalui pendekatan pendapatan, tingkat konsumsi maupun indikator kesejahteraan suatu negara. Konsep penanggulangan kemiskinan dapat diukur menggunakan indikator-indikator kemiskinan, sejauh mana batas garis kemiskinan pada indikator-indikator kemiskinan terlampaui, menunjukkan keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Pendekatan pengukuran kemiskinan yang digunakan yaitu model tingkat konsumsi dan model kesejahteraan keluarga. Definisi kemiskinan dari Bank Dunia (*World Bank*) menetapkan ukuran pendapatan sebesar US\$ 2 per hari sebagai standar minimum garis kemiskinan. Sajogyo (1971) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Dengan membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan dapat ditetapkan untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen kurang dari 20 kg per orang per bulan, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen kurang dari 30 kg per orang per bulan.

Berbeda dengan model tingkat konsumsi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan⁶. Dengan menetapkan keluarga sebagai sasaran survey, data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu: **(1) Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin)**, diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator *basic needs*; **(2) Keluarga Sejahtera I (Miskin)**, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*); **(3) Tahapan Keluarga Sejahtera II**, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*); **(4) Tahapan Keluarga Sejahtera III**, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator KS III Plus/ indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*); dan **(5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus**, yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari indikator tahapan KS I sampai dengan indikator tahapan KS III Plus.

Penelitian ini memadukan dan mengoperasionalkan ketiga definisi yang telah dibahas untuk mengetahui indikator kemiskinan dan mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga melalui *Boarding School* SMK N 3 Purbalingga.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (metode campuran) antara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif tetap sebagai pendekatan utama. Lokasi penelitian berada di wilayah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan dokumen dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan, serta menggunakan kuesioner penelitian kepada subyek penelitian yaitu siswa alumni/ lulusan *Boarding School* SMK Negeri 3 Purbalingga.

⁶ Ade Cahyat, “Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan Di Indonesia”. Governance Brief, No. 2, November 2004, Hlm. 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga (SMK N 3 Purbalingga) muncul dan diprakarsai pada tahun 2010 dengan konsep awal untuk melayani siswa-siswi dari keluarga miskin yang mustahil melanjutkan pendidikan jenjang SMA/ SMK. Tahap perencanaan kebijakan dimulai tahun 2010, sampai pada tahun 2013 akhirnya resmi dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang pertama di SMK N 3 Purbalingga. Pendirian SMK N 3 Purbalingga didorong oleh penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan mendapat Dana Hibah dari Pemerintah Pusat, yaitu Dana Intensif Daerah (DID), karena penganggaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara 5 tahun berturut-turut berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga dana yang diperoleh tersebut dimanfaatkan, yang pada tahun 2012 mulai dilakukan pembangunan fisik SMK N 3 Purbalingga.

Hal mendasar yang melatarbelakangi pendirian SMK N 3 Purbalingga sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga yang selalu berada pada peringkat atas Kabupaten/Kota paling miskin pada tahun 2010, berdasar data kemiskinan BPS Jawa Tengah diketahui bahwa Kabupaten Purbalingga menempati peringkat pertama dari 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dengan persentase sebesar 24, 57 %.

Tabel 1 Indikator Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

Indikator	Juli 2010	September 2011	September 2012	September 2013	September 2014
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	209,00	196,00	184,90	181,10	176,04
Persentase Penduduk Miskin	24,58	23,06	21,19	20,53	19,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Tabel 2 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2013

Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013
13-15	86.85	84.76	85.42	85.65
16-18	53.74	44.62	49.36	41.80

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga - Susenas, 2010-2013

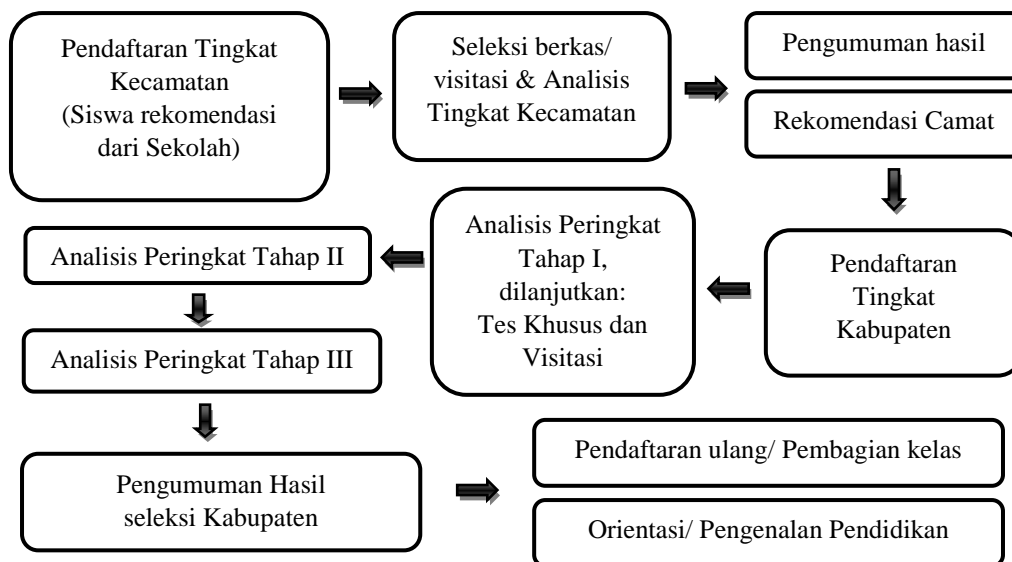
Di sisi yang lain, komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang diketahui berada dalam Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang rendah menjadi aspek yang terkait dengan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini, APS Pendidikan Menengah (Dikmen) berada pada tingkat yang rendah dibandingkan jenjang dibawahnya, artinya banyak siswa atau anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan menengah atas, dengan beragam faktor, salah satunya adalah keadaan ekonomi keluarga yang tergolong miskin.

Kedua faktor tersebut di atas menjadi sangat logis dengan keputusan mendirikan sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) gratis yang khusus diperuntukan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar dapat bekerja dan mendapat penghasilan, kemudian memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Alasan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), memiliki tujuan dan harapan siswa SMK N 3 Purbalingga dapat terserap dunia kerja secara cepat setelah lulus karena telah memiliki ketrampilan, tanpa memprioritaskan melanjutkan pendidikan kuliah di Perguruan Tinggi atau Institusi Sekolah Tinggi. Jurusan yang dibuka di SMK N 3 Purbalingga mempertimbangkan kebutuhan industri dan persaingan dalam dunia kerja, yaitu Teknik Pengelasan pada tahun pertama dan Teknik Pemesinan, yang baru dibuka pada tahun kedua, sederhananya kompetensi pengelasan dibutuhkan industri karena hampir semua produk industri membutuhkan proses pengelasan dan terdapat komponen mesin yang memerlukan kemampuan mengoperasikan mesin dengan baik karena berkembang semakin canggih dengan cepat.

B. MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 3 Purbalingga

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK N 3 Purbalingga yang pertama kali diatur dalam Peraturan Bupati, dan pada tahun-tahun berikutnya juga selalu diatur dengan peraturan perundangan berupa Peraturan Bupati (Perbup). Dalam Bab III Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun 2013/2014, proses Penerimaan dapat digambarkan:



Gambar 1
Alur Penerimaan Peserta Didik Baru

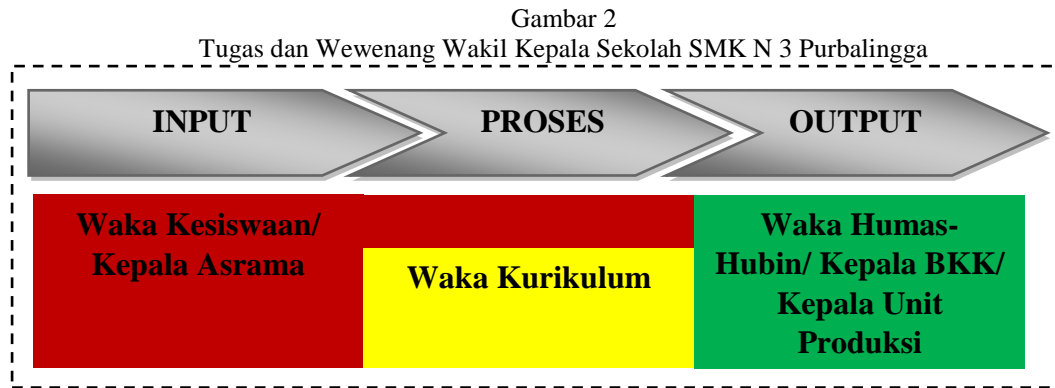
Pedoman pendidikan SMK N 3 Purbalingga

Dengan mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah, maka berdasar Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga, dasar Pengelolaan pendidikan SMK N 3 Purbalingga mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan pengelolaan pendidikan asrama hanya mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Mengenai pendidikan asrama yang diterapkan SMK N 3 Purbalingga, merupakan aspek yang membedakan dengan pengelolaan Sekolah/ SMK lain, artinya terdapat kolaboratif kurikulum regular, ditambah dengan kurikulum lokal yang menjadi tanggung jawab asrama, untuk mencapai tujuan pendidikan yang menciptakan lulusan berkualitas dan memiliki karakter yang baik, maka pendidikan asrama melalui sistem *Boarding School* SMK N 3 Purbalingga diberlakukan anpa terpengaruhi kehidupan luar yang sulit dilakukan pengawasan oleh orang tua siswa sekalipun.

Penyelenggaraan Pendidikan SMK N 3 Purbalingga

Penyelenggaraan pendidikan di SMK N 3 Purbalingga secara resmi dibuka pada tahun 2013 atau tahun pelajaran 2013/2014, yang diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun 2013/2014. Pada tahun pertama,

jurusan yang dibuka hanya Teknik Pengelasan, karena kapasitas sarana pendidikan, hanya dapat mengakomodasi pembelajaran Teknik Pengelasan, sampai pada akhirnya tahun kedua resmi dibuka Teknik Pemesinan untuk siswa reguler (bukan *Boarding School*).



Skema penyelenggaraan pendidikan SMK N 3 Purbalingga diatas menggambarkan penyelenggaraan pendidikan SMK N 3 Purbalingga sesuai Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga, dibedakan menjadi Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Asrama. Secara teknis, kedua macam penyelenggaraan pendidikan tersebut menjadi tanggung jawab pendidik dan tenaga pendidik di SMK N 3 Purbalingga, namun kebijakan sekolah mendelegasikan setiap urusan kepada Wakil Kepala Sekolah di dalam tim kerja masing-masing agar pelaksanaan dan pencapaian dapat optimal.

C. OPERASIONAL

Dengan dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga dan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun 2013/2014, maka secara resmi SMK N 3 Purbalingga mulai dioperasikan pada tahun 2013. Sampai pada tahun 2016, artinya sudah 4 tahun SMK N 3 Purbalingga dioperasikan, dan telah meluluskan angkatan pertama. Keberlanjutan SMK Negeri 3 Purbalingga yang tetap optimal sampai pada pemerintahan yang sekarang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Diketahui bahwa melalui terobosan pelayanan publik di SMK Negeri 3 Purbalingga yang dikemas dalam proposal berjudul “Matahari untuk

Kaum Papa di Purbalingga”, telah berhasil menjadi TOP 35 SiNovik 2016 yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, penetapan tersebut melalui Keputusan Menteri PANRB No. 99/ 2016 tentang Penetapan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016.

Aktor Kebijakan

Tabel 3
Pemenetaan Aktor Kebijakan

No.	Aktor Kebijakan	Peran/ Fungsi				
		Perencanaan	Anggaran	Seleksi	Operasional	Evaluasi
1.	Bappeda Kabupaten Purbalingga	√	√	X	X	√
2.	Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga	√	√	√	√	√
3.	DPPKAD Kabupaten Purbalingga	X	√	X	X	√
4.	Camat se-Kabupaten Purbalingga	X	X	√	X	X
5.	UPTD Dinas Pendidikan se-Kecamatan	X	X	√	X	X
6.	Kepala SMP/MTs se-Kabupaten Purbalingga	X	X	√	X	X
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	X	X	√	X	X
8.	Departemen Agama Kabupaten Purbalingga	X	X	√	X	X
9.	Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)	X	X	X	√	X
10.	UPT SMK Negeri 3 Purbalingga	√	√	√	√	√

Sumber: Transkrip Wawancara Penelitian

Indikator Keberhasilan Kebijakan

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan maka perlu diketahui indicator-indikator yang pada umumnya dapat menjadi ukuran pencapaian sebuah kebijakan. Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2013: 90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel berikut:

<p>Pertama, Komunikasi. Perencanaan dan keberlanjutan kebijakan yang menjadi program warisan selama pergantian periode kepemimpinan menunjukkan aspek komunikasi berjalan semestinya karena tidak merubah tujuan kebijakan dan semakin melibatkan <i>stakeholder</i> dalam operasionalnya.</p>	<p>Kedua, Sumberdaya. Yaitu meliputi: a) Sumber Daya Manusia, tenaga pendidik (guru) dan kependidikan; dan b) Sumber Daya Finansial (Anggaran), seluruhnya berasal dari APBD, jadi semua langkah-langkah mengenai anggaran harus sesuai dengan uraian rencana kegiatan di APBD Kabupaten Purbalingga.</p>
<p>Ketiga, Disposisi. Sikap dan dukungan para pejabat pelaksana terbukti dalam keberlanjutan kebijakan yang sudah mendapat penghargaan terobosan pelayanan publik yang dikemas dalam proposal berjudul “Matahari untuk Kaum Papa di Purbalingga”, berhasil menjadi TOP 35 SiNovik 2016, menunjukkan dukungan dan kesepemahaman antar pelaksana kebijakan sesuai kewenangan masing-masing.</p>	<p>Keempat, Struktur Birokrasi. Birokrasi tersistem secara jelas tugas dan fungsinya, dalam operasional maupun forum-forum evaluasi kebijakan setiap tahunnya. Keterlibatan semua jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga memang secara teknis berada dalam kewenangan Bappeda dan Dinas Pendidikan, namun dalam prosesnya melalui dukungan anggaran dan kesepemahaman tujuan kebijakan.</p>

Rencana Pengembangan dan Tindak Lanjut Kebijakan

Sesuai Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka secara resmi dimulai pada tahun 2017, SMK N 3 Purbalingga tidak lagi bergantung pada APBD Kabupaten Purbalingga dan pada tahun pelajaran 2017/2018, PPDB SMK N 3 Purbalingga akan menerima siswa dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Tertanggal 2 Oktober 2016, secara kelembagaan sudah alih kewenangan dari P3D (Personal, Prasaran, Pembiayaan, dan Dokumen) menjadi P2D (Personal, Prasaran, Dokumen), tapi pembiayaan baru dimulai 1 Januari 2017. Pembahasan mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan SMK Negeri 3 Purbalingga kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan keberlanjutan kebijakan, memang berdampak pada pengelolaan secara teknis, seperti anggaran, proses seleksi, koordinasi, dan sebagainya, namun keputusan pengalihan kewenangan SMK N 3 Purbalingga ke Pemerintah Provinsi, dianggap tidak terlalu berpengaruh dengan model penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui SMK N 3 Purbalingga, yang mana memang menjadi *pilot project/ roal mode* kebijakan pendirian SMK Negeri Jawa Tengah yang ada di Semarang dan Pati⁷.

⁷ SMK Negeri Jawa Tengah resmi dibuka setelah kebijakan Pemkab Purbalingga melalui SMK Negeri 3 Purbalingga diimplementasikan, yang mana merupakan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah yang mengadopsi inovasi SMK N 3 Purbalingga dengan membuka sekolah gratis bagi siswa miskin.

TEMUAN DAN PENYAJIAN DATA KUANTITATIF

Pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan populasi alumni SMK N 3 Purbalingga yang berjumlah 65 orang, sehingga sample penelitian sebanyak 40 responden (Memakai Rumus Slovin), yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*.

Identitas Diri Responden. Diketahui terdapat kesamaan identitas responden yang homogen dalam penelitian, yaitu: 1) Laki-laki; 2) Lulus pada tahun pelajaran 2015/ 2016; dan 3) Belum Kawin. Klasifikasi responden berdasar usia mengacu pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang mengklasifikasikan kelompok umur 16-18 untuk APS Pendidikan Menengah Atas dan kelompok umur 19-24 untuk APS Pendidikan Tinggi, terdapat 42.5 % responden yang termasuk dalam umur Pendidikan Menengah, dan 57,5 % dikelompokkan dalam Pendidikan Tinggi, yang dalam konteks dan tujuan SMK N 3 Purbalingga adalah sudah memiliki pekerjaan.

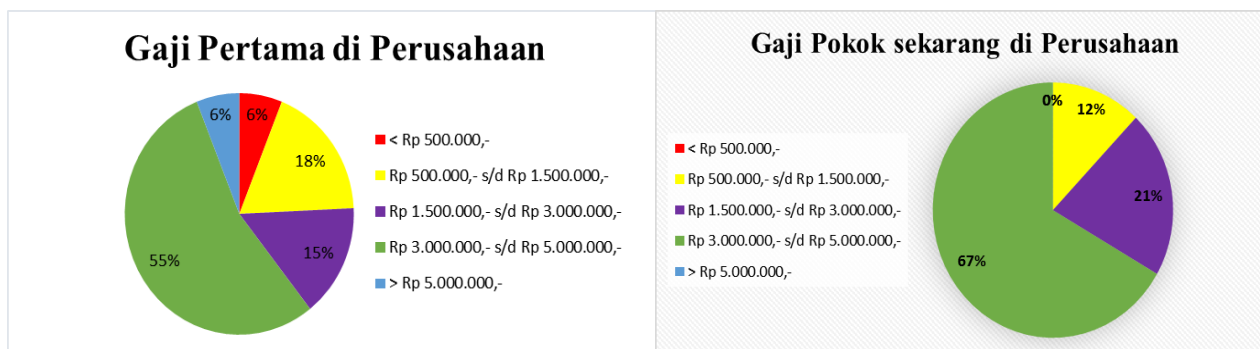
Aspek Pekerjaan dan Penghasilan. Lulusan SMK N 3 Purbalingga yang setelah lulus, tidak ada yang bekerja di perusahaan dalam area Purbalingga dan sekitarnya, melainkan bekerja di Luar Kota (Dalam Provinsi) sebanyak 10 % dan Luar Kota (Luar Provinsi) sebanyak 90 %. Saat pengambilan data diketahui bahwa tempat kerja sekarang, diketahui 5 % di Luar Kota (Dalam Provinsi) dan 95 % di Luar Kota (Luar Provinsi).

Gambar 3 Status ketenagakerjaan dan jadwal kerja



Lama bekerja dalam suatu perusahaan menjadi salah satu faktor pengaruh status ketenagakerjaan dalam perusahaan, diketahui mayoritas responden bekerja di perusahaan dalam kisaran 4 – 9 Bulan dengan status ketenagakerjaan: 2 % Tenaga Kerja Tetap, 52 % Tenaga kerja lepas, 38 % tenaga kerja kontrak, dan 8 % magang.

Gambar 4 Perbandingan gaji yang diterima

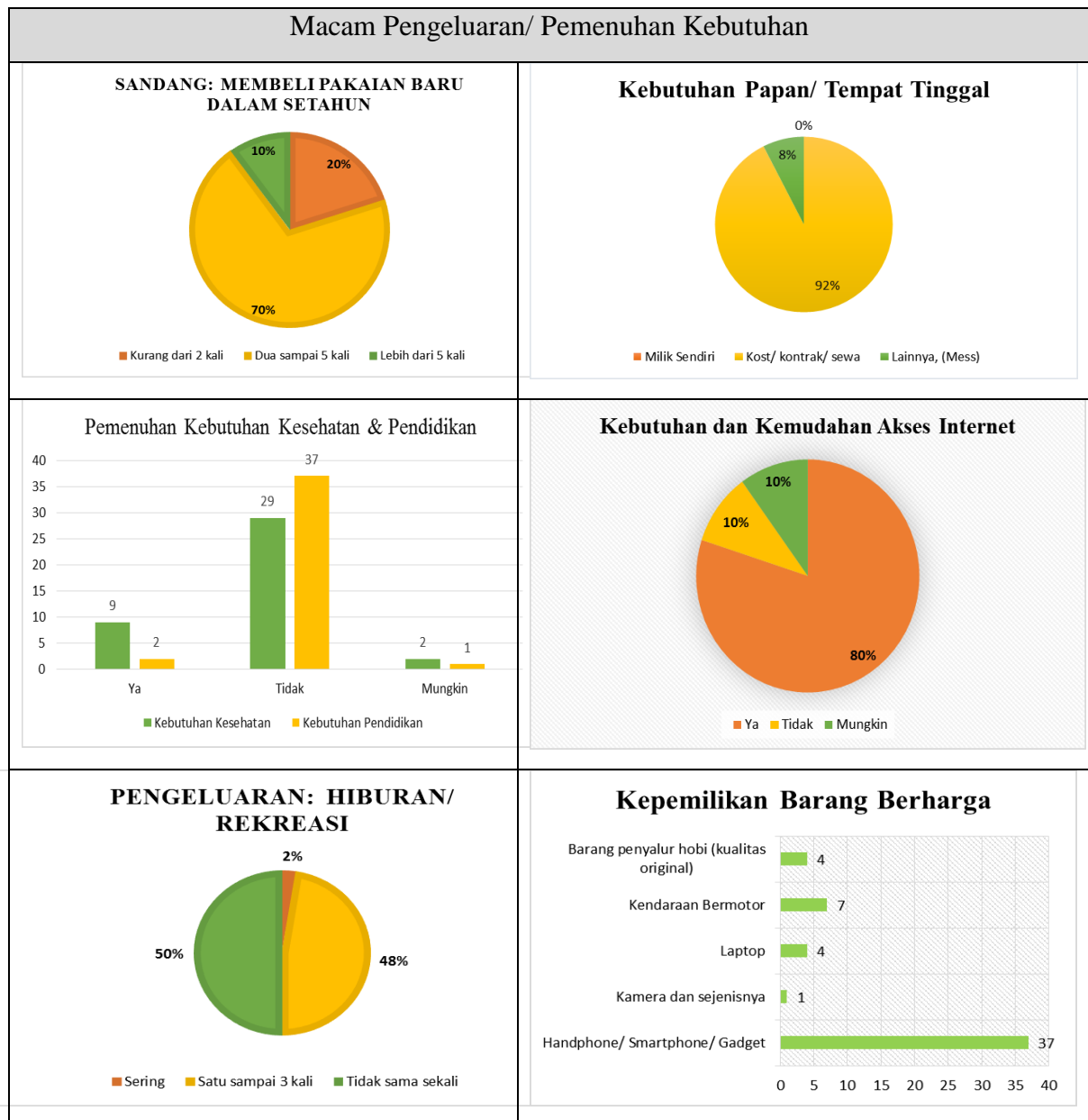


Kedua diagram diatas menggambarkan perbandingan gaji pertama yang diterima Lulusan SMK N 3 Purbalingga di Perusahaan dengan gaji pokok sekarang yang diterima dari Perusahaan. Diketahui bahwa persentase gaji pertama Lulusan SMK N 3 Purbalingga secara berurutan mulai klasifikasi kurang dari Rp 500.000,- sampai dengan lebih dari Rp 5.000.000,- yang mana menunjukkan terdapat peningkatan karena mayoritas memperoleh gaji Rp. 3.000.000,- s/d Rp 5.000.000,- dengan persentase 67 %. Sementara itu, juga diketahui terdapat 2 Lulusan SMK N 3 Purbalingga yang memiliki pendapatan selain gaji yang diperoleh dari perusahaan, yaitu melalui bisnis *online-shop*, namun ternyata tidak sepenuhnya memanfaatkan ketrampilan yang di dapat saat masih menempuh pendidikan Kejuruan. Kebiasaan menabung (*saving*) yang didapat dari pekerjaan juga diketahui dari kuesioner penelitian, yang menunjukkan kecenderungan menabung dalam bentuk uang dengan persentase 82 %, dan hanya 12 % menabung dalam bentuk barang (investasi).

Aspek Pengeluaran & Pemenuhan Kebutuhan. Pola konsumsi dalam pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan subyek penelitian dapat menunjukkan manajemen kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, internet dan kebutuhan lainnya. Yang paling utama adalah biaya makan dalam sehari, diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk makan dalam satu hari mayoritas Lulusan SMK N 3 Purbalingga mengeluarkan biaya dalam kisaran Rp 20.000,- s/d Rp 30.000,- per hari dengan persentase 45 %, dengan pola makan responden dalam satu hari yang cenderung lebih dari 2 kali dalam makan pokok dengan persentase 75 % dan konsumsi *snack* (bukan makan pokok) sebanyak 1 sampai 2 kali dalam sehari dengan persentase 72 %. Berdasar kuesioner, juga diketahui bahwa 30 responden atau 75 % tidak membeli beras untuk memenuhi kebutuhan makan setiap hari, melainkan langsung membeli pada tempat makan atau semacamnya. Responden yang

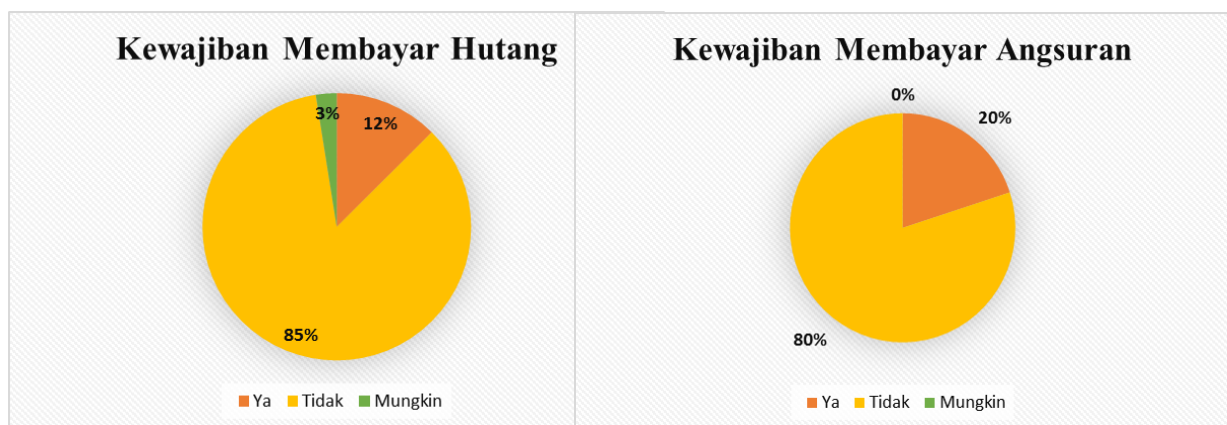
membeli stok beras untuk kebutuhan satu bulan diketahui 7 responden memenuhi kebutuhan beras kurang dari 20 kg per bulan, 2 responden antara 20 kg s/d 30 kg, dan 1 responden lebih dari 30 kg per bulan. Selain pemenuhan kebutuhan pangan, tentu terdapat pengeluaran bagi Lulusan SMK N 3 Purbalingga dalam kebutuhan primer lainnya. Berikut disajikan persentase pengeluaran & pemenuhan kebutuhan lainnya:

Tabel 4
Pemenuhan Kebutuhan Primer Lainnya



Pemenuhan kebutuhan sandang dalam setahun yang dilakukan dengan membeli pakaian baru, digambarkan dalam diagram bahwa 70 % membeli 2 sampai 5 kali dalam setahun, sementara untuk kebutuhan tempat tinggal, sebanyak 92 % mengeluarkan biaya untuk kost/ kontrak/ sewa. Kebutuhan primer lainnya adalah kesehatan dan pendidikan, berdasar kuesioner diketahui bahwa mayoritas responden tidak memiliki pengeluaran yang rutin dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan, baik kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya kebutuhan atau pengeluaran untuk internet dan hiburan/rekreasi, sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan selera responden. Berdasar kedua gambar diketahui bahwa 80 % memiliki kebutuhan dan kemudahan akses internet, ternyata tidak berbanding lurus dengan pengeluaran rutin untuk hiburan atau rekreasi yang ditunjukkan dalam gambar diatas, mengingat 50 % tidak sama sekali, sementara sisanya yaitu 48 % memiliki pengeluaran hiburan/ rekreasi satu sampai 3 kali dalam sebulan. Mengenai grafik yang menunjukkan kepemilikan barang berharga yang dibeli dengan pendapatan dari perusahaan, terbanyak adalah Handphone/ Smartphone/ Gadget sebanyak 37 responden.

Kewajiban membayar hutang atau angsuran untuk pembelian suatu barang juga termasuk dalam pengeluaran yang harus dianggarkan. Kuesioner menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan tidak memiliki kewajiban hutang dengan persentase 85 % dan tidak memiliki kewajiban angsuran atas pembelian suatu barang dengan persentase sebesar 80 %.



Gambar 5 Pengeluaran untuk hutang dan angsuran

Selain untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, pendapatan yang diperoleh lulusan SMK N 3 Purbalingga dari perusahaan juga diberikan kepada orang tua atau keluarga di rumah,

mengingat latar belakang keluarga yang termasuk keluarga miskin. Berdasar kuesioner diketahui kecenderungan responden dalam menyisihkan pendapatan untuk diberikan kepada keluarga, seperti dalam kedua diagram dibawah ini:



Gambar 6 Penghasilan untuk keluarga

Digambarkan bahwa 82 % responden selalu memberikan penghasilan kepada keluarga di rumah, dan 18 % menjawab mungkin atau kadang-kadang, serta tidak ada yang tidak memberikan penghasilan kepada keluarga di rumah. Besaran yang diberikan untuk keluarga, 80 % responden sebesar seperempat dari penghasilan dan 20 % sebesar setengah dari penghasilan, serta tidak ada yang memberikan penghasilan sepenuhnya kepada keluarga. Hal ini dapat menggambarkan melalui pendapatan yang diperoleh lulusan SMK N 3 Purbalingga dari perusahaan setidaknya dapat mendorong keadaan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dan mendorong upaya penanggulangan kemiskinan keluarga, apabila secara nyata melalui pendapatan yang diterima lulusan SMK N 3 Purbalingga dapat menjadi pemasukan utama untuk pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga dan responden diposisikan menjadi tulang punggung dalam keluarga masing-masing.

Analisis Data Kuesioner dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pendidikan *Boarding School* SMK Negeri 3 Purbalingga. Sesuai dengan operasional konsep dalam penelitian, maka untuk mengetahui apakah subyek penelitian masih termasuk dalam kelompok miskin atau tidak, digunakan indikator-indikator yang dapat mengukur tingkat kemiskinan atau kesejahteraan subyek penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengolah hasil kuesioner penelitian yang diperkuat dengan argumen-argumen yang muncul dalam data kualitatif. Pengolahan data kuesioner penelitian mempertimbangkan definisi kemiskinan menurut Bank Dunia (*World Bank*), pendapat Sajogyo (1971) yang menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per

kapita, dan indikator kesejahteraan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dilakukan dengan pentahapan keluarga sejahtera (mengingat kondisi subyek penelitian yang 100 % belum berstatus berkeluarga, memiliki istri dan anak, maka konteks keluarga sejahtera yang menetapkan keluarga sebagai sasaran survey, disesuaikan dengan data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner penelitian), menjadi ukuran yang dipakai dalam penelitian untuk mengetahui keberhasilan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasar hasil kuesioner, disajikan rekapitulasi hasil penelitian sesuai masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 5 Gaji Pokok di Perusahaan

Gaji Pokok Perusahaan	Responden	Persentase
< Rp 500.000,-	0	0 %
Rp 500.000,- s/d Rp 1.500.000,-	4	10 %
Rp 1.500.000,- s/d Rp 3.000.000,-	8	20 %
Rp 3.000.000,- s/d Rp 5.000.000,-	28	70 %
> Rp 5.000.000,-	0	0%
	40	100 %

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasar Kuesioner Penelitian

Berdasar Garis Kemiskinan Bank Dunia (*World Bank*), menunjukkan bahwa 90 % responden secara pasti dapat dikategorikan sudah memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan sebesar Rp 810.000,- dengan melihat aspek pendapatan, responden yang merupakan Lulusan SMK N 3 Purbalingga sebesar 90 % termasuk tidak miskin dan 10 % masih berada di sekitar standar minimum garis kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, adalah pindah tempat kerja, status ketenagakerjaan dan belum menerima peningkatan gaji.

Tabel 6 Pemenuhan Kebutuhan dan Konsumsi Beras dalam Sebulan

Membeli beras?	Responden			Persentase
Ya	< 20 kg	4	7	17,5 %
	20 kg s/d 30 kg	2		
	> 30 kg	1		
Mungkin (kadang-kadang)	< 20 kg	3	3	7,5 %
	20 kg s/d 30 kg	0		
	> 30 kg	0		
Tidak	-	-	30	75 %
			40	100%

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasar Kuesioner Penelitian

Melihat pendapat kemiskinan menurut Sajogyo, kuesioner penelitian menunjukkan bahwa ternyata hanya 17,5 % responden yang selalu membeli beras untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan sebesar 7,5 % menjawab mungkin (kadang-kadang), menunjukkan konsep ini, tanpa melihat berapa besar (kg) dan wilayah (perdesaan/ perkotaan), tidak dapat menunjukkan hasil yang valid untuk penelitian. Temuan dipengaruhi faktor selera, pola makan, dan gaya hidup responden yang cenderung mengeluarkan uang untuk membeli makanan jadi setiap harinya, tidak membeli beras sebagai bahan pokok.

Tabel 7
Klasifikasi Kesejahteraan Responden

Kategorisasi	Poin	Responden	Persentase
Pra Sejahtera	0 – 1	0	0 %
KS I	2 – 3	0	0 %
KS II	4 – 7	5	12.5 %
KS III	8 - 9	28	70 %
KS III Plus	10	7	17.5 %
		40	100 %

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasar Kuesioner Penelitian

Sesuai Indikator Kesejahteraan BKKBN yang menetapkan bahwa 15 indikator yang telah disesuaikan dengan konteks penelitian, 5 indikator telah terukur tanpa mempertimbangkan jawaban dalam kuesioner dan 10 indikator terukur dengan kuesioner penelitian, yaitu makanan, jaminan kesehatan jika sakit, pakaian, kesehatan, ibadah, tabungan, kegiatan masyarakat, informasi, sumbangan, dan aktif organisasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengelompokan responden: 12,5 % responden telah termasuk KS II, 70 % responden telah termasuk KS III, dan 17,5 % responden telah termasuk KS III Plus.

PENUTUP

Dari pembahasan hasil dan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga (SMK Negeri 3 Purbalingga) yang resmi dioperasikan pada tahun 2013 merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga saat dipimpin oleh Bupati Drs. Heru Sudjatmiko, M.Si untuk melayani siswa-siswi dari keluarga miskin melanjutkan pendidikan jenjang SMA/ SMK. Pemerintah

Kabupaten Purbalingga menetapkan SMK Negeri 3 Purbalingga sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan prinsip memutus rantai kemiskinan, dengan latar belakang tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga yang selalu berada pada peringkat atas Kabupaten/ Kota paling miskin di Provinsi Jawa Tengah dan rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang Pendidikan Menengah. Penyelenggaraan Pendidikan di SMK N 3 Purbalingga yang meliputi input, proses dan output dilaksanakan seiring diberlakukannya pendidikan asrama, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga yang mengacu pada kurikulum nasional.

Aktor pemerintah yang secara teknis memiliki pengaruh dan sangat terlibat sejak perencanaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga. Kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini memiliki pengaruh yang besar dalam mencapai misi pendidikan selain pihak pendidik maupun tenaga kependidikan di SMK N 3 Purbalingga, dan berperan besar dalam mencapai keberhasilan kebijakan yang diukur dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam kebijakan tersebut. Sesuai amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka secara resmi dimulai pada tahun 2017, SMK N 3 Purbalingga tidak lagi bergantung pada APBD Kabupaten Purbalingga dan pada tahun pelajaran 2017/2018, PPDB SMK N 3 Purbalingga akan menerima siswa dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Pengalihan kewenangan pengelolaan SMK Negeri 3 Purbalingga kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan keberlanjutan kebijakan, memang berdampak pada pengelolaan secara teknis, seperti anggaran, proses seleksi, koordinasi, dan sebagainya, namun hal tersebut harus dilaksanakan karena bagaimanapun merupakan amanat UU dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan kebijakan ini, yang telah diimplementasikan secara berkelanjutan dan konsisten dipertahankan oleh Kepala Daerah (Bupati) selama 3 kepemimpinan telah mendapat pengakuan melalui terobosan pelayanan publik di SMK Negeri 3 Purbalingga yang dikemas dalam proposal berjudul “Matahari untuk Kaum Papa di Purbalingga”, berhasil menjadi TOP 35 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Secara kuantitatif berdasar indikator dan operasional konsep yang digunakan menunjukkan

bahwa pencapaian atau hasil atau dampak dari kebijakan telah menunjukkan peningkatan taraf hidup anak yang berasal dari keluarga miskin, sebagai obyek permasalahan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan *Boarding School* SMK N 3 Purbalingga dengan prinsip memutus rantai kemiskinan telah berhasil mengurangi angka penduduk miskin, keberlanjutan program yang akan meluluskan lebih banyak lagi siswa-siswanya, sangat berpeluang dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Saran & Rekomendasi

Temuan-temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan regulasi atau implementasi sebagaimana mestinya, melalui penelitian ini penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut: 1) Pemerintah sebagai pemegang kendali dalam pelaksanaan kebijakan dituntut perlu konsisten dengan visi dan tujuan kebijakan dengan melakukan hal-hal yang optimal dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka sudah seharusnya tidak diputuskan inovasi atau ide yang tidak sesuai dengan perencanaan kebijakan, misalnya: dibuka kelas reguler yang tidak *boarding school*; 2) Sebagai inovasi pelayanan publik yang menjadi *roal mode* kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan, dan mendapat pengakuan sebagai salah satu TOP SiNovik 2016, maka tuntutan untuk mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan APS mutlak harus dipenuhi, agar kebijakan memiliki dampak yang signifikan sebagai solusi permasalahan; 3) Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) yang pada awalnya dilibatkan sebagai pengelola dana SMK N 3 Purbalingga namun tidak dilegalkan karena regulasi pemerintah, seharusnya dilibatkan kembali dalam fungsi yang berbeda, misalnya peningkatan ketrampilan diluar pendidikan dan kurikulum di sekolah, seperti wirausaha, penguasaan teknologi, dan sebagainya; 4) Alih kewenangan yang berlaku pada tahun 2017 sesuai amanat UU Pemerintah Daerah harus disikapi dengan bijak, agar kontribusi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai pihak yang merintis dan merancang kebijakan tetap memberi dukungan moril dan materil secara tidak formal untuk mendorong dan mempertahankan keberlanjutan kebijakan; dan 5) Keberlanjutan kebijakan SMK N 3 Purbalingga sebagai program memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, mutlak harus dipertahankan agar masalah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dapat secara signifikan berkurang melalui lulusan SMK N 3 Purbalingga yang setiap tahun secara perlahan memberi kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chan, Sam M. & Tuti T. Sam. (2005). *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Cet. Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, Nanang. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- George C. Edwards III. 1980. "Implementing Public Policy". Washington, D.C: Congressional Quarterly Press
- Goudzwaard, Bob & Harry de Lange. (1998). *Di Balik Kemiskinan & Kemakmuran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moelong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiran, Paulus. (2003). *Kerikil-Kerikil Di Masa Transisi: Serpihan Esai Pendidikan, Agama, Politik dan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktik*. Surabaya: PMN.
- Patton, Michael Quinn. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Dawam. (2006). *Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rawita, Ino Sutisno. (2013). *Kebijakan Pendidikan: Teori, Implementasi, dan Monev*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Rusdiana, Ahmad. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwono, Jonathan. (2013). *Strategi Melakukan Riset: Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Stamboel, Kemal A. (2012). *Panggilan Keberpihakan: Strategi Mengakhiri Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono, AG. (2013). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwati, Ninik. (2009). *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Malang: Intimedia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto, Hari. (2006). *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan: Tinjauan Historis Era Orde Baru*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.

B. Sumber Internet dan Jurnal Online

- Ari Widodo, Waridin, dan Johanna Maria K. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa

Tengah". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, Juli 2011.

Ade Cahyat, "Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan Di Indonesia". Governance Brief, No. 2, November 2004, Hlm. 4

Executive Summary: Penelitian tentang Keterkaitan Pendidikan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Jawa Tengah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, tahun 2008.

Haedar Akib. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". Jurnal administrasi Publik, No. 1 Vol 1, Tahun 2010.

<http://aplikasi.bkkbn.go.id>, diakses tanggal 12 Desember 2016

<https://purbalinggakab.bps.go.id>, diakses 28 November 2016

<http://www.tubasmedia.com/smkn-3-purbalingga-terima-siswa-keluarga-miskin/#.WP8z0vmGPIU> diakses 28 November 2016

Media online redaksi Berita Jateng: <http://beritajateng.net/purbalingga-raih-penghargaan-sinovik-top-35/> diakses 1 September 2016

Media online redaksi Satelit Post: <http://satelitnews.co/berita--purbalingga-termiskin-di-karesidenan-banyumas.html>, diakses 1 September 2016

Website resmi SMK N 3 Purbalingga: <http://smkn3purbalingga.sch.id/>

C. Regulasi dan Dokumen Pemerintah

Dokumen: "Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Tahun 2015", Kabupaten Purbalingga.

Dokumen: "Purbalingga dalam Angka 2015", Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.

Dokumen: "Statistik Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015", Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.

Dokumen: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). "Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga".

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga.

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Purbalingga Tahun 2013/2014.